PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 26 Juni 2020 Halaman: 2

1.156 PENDAFTAR KOTA YOGYA BELUM ADA KEJELASAN

Dewan Usulkan Kartu Prakerja Dialihkan BST

YOGYA (KR) - Ketidakjelasan program Kartu Prakerja dari pemerintah pusat, turut berdampak di daerah. Kalangan DPRD Kota Yogya pun mengusulkan agar program tersebut dialihkan menjadi Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sudah digulirkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan, menjelaskan pihaknya belum mendapatkan laporan detail siapa saja warga Kota Yogya yang sudah berhasil menjadi peserta Kartu Prakerja serta bagaimana bentuk bantuannya. "Kalau Kartu Prakerja sudah tidak bisa diharapkan. Lebih baik memang dihentikan karena saat ini sedang dalam pemeriksaan KPK," jelasnya, Kamis (25/6).

Selama ini program Kartu Prakerja diarahkan bagi warga terdampak Covid-19 namun tidak masuk dalam penerima BST maupun bantuan lain dari Kementerian Sosial. Terutama bagi kalangan tenaga kerja yang di PHK maupun dirumahkan di sektor UMKM maupun industri pariwisata.

Krisnadi menambahkan, pihaknya sudah meminta Pemkot agar sisa perhitungan bantuan sosial untuk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS), bisa diberikan kepada pekerja warga Kota Yogya yang di PHK dan dirumahkan. Data pekerja yang terkena PHK mencapai 62 orang dan yang dirumahkan 1.445 orang.

"Ada selisih antara warga terdampak yang diusulkan dan sudah terverifikasi. Selisih itu yang kita minta dialihkan untuk pekerja," tandasnya.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut terdapat 1.156 warga Kota Yogya yang mendaftar Kartu Prakerja. Pihaknya juga masih menunggu kejelasan bentuk bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini karena program tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Kecuali kalau anggaran dari pusat itu diserahkan ke daerah kemudian kita kelola dan kita laporkan. Jangan sampai orang yang seharusnya lolos justru tidak masuk, kemudian orang yang coba-coba justru masuk Kartu Prakerja," urainya.

Di samping itu, Heroe berharap semua memiliki pandangan yang sama terkait intervensi bantuan warga terdampak Covid-19. Berkaca pada bantuan sosial yang digulirkan oleh pusat, provinsi dan daerah, bantuan untuk tahap selanjutnya seharusnya lebih tertata dan tepat sasaran.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005